

**PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
MENJADI BADAN LAYANAN UMUM
(STUDI DI UPTD CIMAHİ TECHNO PARK DAN UPTD SOLO
TECHNO PARK TAHUN 2021)**

Dicky Febriansyah¹

Utang Suwaryo²

Rahman Mulyawan³

Universitas Padjajaran^{1,2,3}

*Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, Hekarmanah, Kecamatan
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363*

Alamat email koresponden: dicky20001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The scope of this paper discusses a comparison of the penta helix collaboration in developing the potential of the technical implementing unit to become a public service agency at the UPTD Cimahi Techno Park and UPTD Solo Techno Park during 2021. The purpose of writing this article is to provide an overview of the collaboration patterns implemented at the Cimahi Technical Implementation Unit Techno Park and the Solo Techno Park Technical Implementation Unit with a comparative method approach. The comparison method was chosen because it was to draw conclusions from related collaboration patterns carried out by two technical implementing units with different management. The findings show that the dimensions of the initial conditions have in common that collaboration begins with a triple helix pattern that develops into a penta helix. In the institutional design dimension, there is a difference, namely that the UPTD Solo Techno Park applies the pattern of a public service agency while the UPTD Cimahi Techno Park takes the form of a technical implementation unit. Facilitative leadership has in common that dominance is in local government. The dimensions of the collaborative process show that the different variations of cooperation actors with the UPTD Solo Techno Park have a wider scope.

Keywords: *Collaboration, Technical Implementation Unit, BLUD, Techno Park.*

ABSTRAK

Ruang lingkup tulisan ini membahas perbandingan kolaborasi penta helix dalam pengembangan potensi unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum pada UPTD Cimahi Techno Park Dan UPTD Solo Techno Park selama

tahun 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran pola kolaborasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi *Techno Park* dan Unit Pelaksana Teknis Solo *Techno Park* dengan pendekatan metode perbandingan. Metode perbandingan dipilih karena untuk menarik kesimpulan dari terkait pola kolaborasi yang dilakukan oleh dua unit pelaksana teknis dengan pengelolaan berbeda. Hasil temuan menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi awal memiliki persamaan bahwa kolaborasi berawal dari pola *triple helix* yang berkembang menjadi penta helix. Pada dimensi desain kelembagaan terdapat perbedaan yaitu UPTD Solo *Techno Park* menerapkan pola badan layanan umum sementara UPTD Cimahi *Techno Park* berbentuk unit pelaksana teknis. Kepemimpinan fasilitatif memiliki persamaan bahwa dominasi pada pemerintah daerah. Dimensi proses kolaboratif menunjukkan perbedaan variasi aktor kerja sama dengan UPTD Solo *Techno Park* memiliki cakupan lebih luas.

Kata Kunci: Kolaborasi, Unit Pelaksana Teknis, BLUD, *Techno Park*.

PENDAHULUAN

Pengelolaan *Techno Park* oleh pemerintah daerah memiliki perbedaan dengan *Techno Park* yang dikelola oleh swasta atau perguruan tinggi. *Techno Park* yang dikelola oleh pemerintah daerah pada umumnya memiliki bentuk tata Kelola sebagai unit pelaksana teknis pada perangkat daerah. Namun demikian, terdapat pula *Techno Park* yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan BLUD. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah memasukkan program pembangunan dan pengembangan *Science and Techno Park* (STP) di seluruh Indonesia sebagai salah satu prioritas nasional. Kemudian dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, Pemerintah mencanangkan untuk dimulainya pembangunan dan pengembangan 100 STP di seluruh Indonesia (Muhammad et al., 2017 : 15). Dalam hal *Techno Park* yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdapat pola pengelolaan tertentu yang menyesuaikan dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Misalnya terdapat *Techno Park* yang dikelola oleh unit pelaksana teknis dengan pola

pengelolaan keuangan unit pelaksana teknis dan ada pula pola pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mekanisme badan layanan umum yang dinilai lebih fleksibel untuk diterapkan pada unit pelayanan pemerintah.

Sebagai sebuah kawasan, technopark menjadi bagian dari sebuah ekosistem inovasi di daerah. Sebuah sistem inovasi di daerah perlu memiliki infrastruktur, dan salah satunya adalah technopark. Dalam menjadi bagian dari ekosistem inovasi di daerah, technopark memiliki peran sebagai wahana jejaring yang mempertemukan pemerintah dengan aktor bisnis dan perguruan tinggi untuk mencapai suatu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong budaya inovasi dan daya saing industri dan institusi berbasis pengetahuan di dalamnya.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Kota Surakarta merupakan contoh daerah kota yang telah memiliki Sains dan *Techno Park*. Baik Kota Cimahi dengan Cimahi *Techno Park* atau Kota Surakarta dengan Solo *Techno Park* merupakan *Techno Park* yang memiliki kemiripan fokus tema pengembangan, yaitu industri kreatif. Sementara *Techno Park* di daerah kabupaten yang cenderung memiliki fokus tema pada bidang industri pangan, pertanian dan perikanan. Selain itu, secara iklim inovasi kota yang dipetakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Kota Cimahi dan Kota Surakarta memiliki kondisi yang dapat dikatakan setara untuk dibandingkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil IDSD tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hasil IDSD Tahun 2021

No.	Aspek	Kota Cimahi	Kota Surakarta
1	Faktor Penguat / <i>Enabling Environment</i>	3.4450	4.0520
2	Sumber Daya Manusia / <i>Human Capital</i>	3,5000	4.5000
3	Faktor Pasar / <i>Market</i>	3.3330	4.0000

4	Ekosistem Inovasi	4.2530	4.9060
SKOR / NILAI INDEKS		3,6330	4,3640

Sumber : Badar Riset dan Inovasi Nasional, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat Kota Cimahi memiliki nilai indeks daya saing di bawah Kota Surakarta dengan selisih 0,731. Dari empat aspek terdapat satu aspek yang memiliki level sama yaitu Ekosistem Inovasi yang sama berada pada level 4. Keempat aspek pada IDSD dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2020 : 43). Keempat aspek tersebut beririsan dengan kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada *technopark*, sehingga menjadi relevan sebagai salah satu gambaran kondisi iklim inovasi daerah. Hal ini membuat keadaan iklim inovasi dan indeks inovasi kedua kota menjadi setara untuk dibandingkan.

Kolaborasi penta helix dalam pengelolaan layanan *technopark* di Cimahi *Techno Park* dipayungi oleh Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 530 / kep-615-Disdagkoperin / 2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros (PIB). Di dalamnya disebutkan bahwa Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros mempunyai tugas melaksanakan konsultasi pengembangan bisnis berbasis teknologi, pendampingan pengembangan bisnis berbasis teknologi dan fasilitasi akses sumber daya produktif antara lain permodalan, inkubasi, akselerator, pemasaran, penerapan teknologi, manajemen dan informasi. Pelayanan *technopark* dikelola oleh Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaku bisnis, akademisi dan komunitas yang sumber pendanaannya berasal dari APBD. Unsur kolaborasi dalam Tim Pengelola PIB ini masih sangat kurang, karena pihak pelaku bisnis, akademisi dan komunitas diposisikan sebagai pendamping, yang artinya tidak berkontribusi dalam penyambutan keputusan dalam pengelolaan *technopark*. Oleh karena itu,

dapat dikatakan Tim Pengelola PIB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan layanan – layanan yang dilaksanakan terpisah oleh masing – masing pemangku kepentingan

Sementara itu, pengelolaan layanan *technopark* di Solo *Technopark* dipayungi oleh Keputusan Wali Kota Surakarta No. 900/65/1/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo *Techno Park* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. UPTD *Solo Techno Park* berstatus BLUD penuh dan sifat bisnisnya adalah sosial ekonomi serta lebih menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pusat rujukan layanan teknologi. Pengelolaan UPTD Solo *Techno Park* sudah dilaksanakan secara kolaboratif dan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel. Pengelola yang kolaboratif ditunjukkan dengan Direksi yang dipimpin oleh unsur profesional yang diseleksi dengan proses seleksi terbuka. Selain itu, pola pengelolaan keuangan dengan bentuk badan layanan umum membuat pengelolaan keuangan menjadi fleksibel dengan tidak membebani APBD dan subsidi akan dilakukan dengan terbatas.

Stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi memberikan perbedaan pola kolaborasi yang terjadi. Astuti et al., (2020: 103) menjelaskan perbedaan kolaborasi penta helix bahwa “Perbedaannya pada modal dan bisnis, keduanya mewakili pemangku kepentingan yang sangat berbeda. Pemangku kepentingan bisnis sering kali agresif, kompetitif, mengambil risiko dan siap untuk gagal. Penta helix bisa jauh melampaui, teknologi dan sains memasuki dimensi ruang yang melibatkan model bisnis inovatif, jaringan sosial dan sebagainya”. Konsep penta helix adalah alat yang ideal untuk bekerja dengan model kompleksitas dan ekonomi, daripada model inovasi bisnis berbasis konsumen/ pasar. Penta helix merupakan

perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta lembaga - lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Model kolaborasi penta helix didasarkan pada lima aktor pemangku kepentingan yaitu *academician, business, community, government, media* yang disingkat menjadi ABCGM. Model ini sangat berguna untuk bidang masalah multi pemangku kepentingan di mana pemangku kepentingan mewakili berbagai minat di suatu lokasi atau masalah. Dari model interaksi pada kolaborasi penta helix tersebut dapat dilihat terdapat lima pemangku kepentingan yang menjadi aktor dalam kolaborasi penta helix.

Berkaitan dengan pola kolaborasi penta helix di *Techno Park*, baik UPTD Solo *Techno Park* maupun UPT Cimahi *Techno Park* mengklaim melaksanakan pola kolaborasi penta helix. Kolaborasi yang dibangun pada UPTD Solo *Techno Park* mengarahkan *Techno Park* menjadi kawasan terpadu dunia industri, perguruan tinggi, riset dan teknologi serta kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi bagi industri kecil menengah dalam rangka peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peran media mensupport semua aktivitas di Solo Technopark tersebut (UPT Solo *Techno Park*, 2021). Cimahi *Techno Park* memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan 16 sub sektor Industri kreatif atau yang disebut dengan konsep kolaborasi Penta Helix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) (UPT Cimahi *Techno Park*, 2021).

Gambar 1.



Sumber : <https://www.cimahitechnopark.id/visi-dan-misi.html> dan <https://solotechnopark.id/>

Rumusan masalah pada artikel ini yaitu bagaimana perbandingan kolaborasi penta helix pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi *Techno Park* dan Unit Pelaksana Teknis Solo *Techno Park* Tahun 2021 yang ditinjau berdasarkan pendekatan model kolaborasi dari Ansell dan Gash dengan ukuran pada dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif dan outcome. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan dengan pendekatan kualitatif. Dalam studi perbandingan ini difokuskan membandingkan satu institusi dengan institusi lainnya yang sejenis, dalam hal ini UPT Cimahi *Techno Park* dengan UPT Solo *Techno Park*.

PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Kondisi awal dalam proses kolaborasi penting untuk melihat kecenderungan kondisi antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan antar pemangku kepentingan. Kondisi awal tersebut akan menciptakan ukuran masing-masing stakeholder untuk memulai kolaborasi, termasuk dalam hal ini pada *Techno Park*. Pada dasarnya *Techno Park* adalah wahana jejaring bagi tiga unsur yaitu pelaku bisnis, perguruan tinggi dan pemerintah, namun seiring dengan berkembangnya kegiatan di dalam *Techno Park* itu sendiri, maka mitra yang terlibat menjadi

bertambah luas. Sama halnya dengan UPT Cimahi *Techno Park* yang awalnya di tahun 2018 mengusung konsep kemitraan empat pilar atau *quadruple helix* (Septriliya, 2018). Kemudian di tahun 2020 terdapat pengembangan menjadi penta helix dengan menambahkan unsur media sebagai mitra. Sementara di UPTD *Solo Techno Park* mengusung konsep penta helix sebagai kawasan terpadu dunia industri, perguruan tinggi, riset dan teknologi serta kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi bagi industri kecil menengah dalam rangka peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat peran media pada peliputan berbagai aktivitas di UPT Cimahi *Techno Park* mau pun UPT *Solo Techno Park*, namun demikian kolaborasi yang terbentuk belum secara kelembagaan. Hal ini membuat kerja sama yang terjalin belum dapat memberikan manfaat secara lebih besar bagi kedua belah pihak. Kemitraan di *Techno Park* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kemitraan UPT Cimahi *Techno Park* dan UPT Solo *Techno Park*

No.	Mitra	Cimahi <i>Techno Park</i>	Solo <i>Techno Park</i>
1	Unsur Pemerintah	Kemenperin, BRIN, Kemenparekraf, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Cimahi	Kemensetneg, Kemeperin, Kominfo, Kemenkop UKM, BRIN, SKK Migas, Pemprov Jawa Tengah, Pemkot Surakarta
2	Unsur Akademisi	Universitas Jenderal Achmad Yani, Polteknik TEDC, UNIKOM, SMKN 1 Cimahi	ATMI, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Slamet Riyadi,
3	Unsur Pelaku Bisnis	Lebak Hosting, Ayena Studio, KAABA, AINAKI, Cubic, Sekolah.id, Otak	Petrotekno Technical School, GMF Aero Asia, Batam Aero Technic, Garena, GOTO, Shopee,

No.	Mitra	Cimahi <i>Techno Park</i>	Solo <i>Techno Park</i>
		Hati, Tepi Garis, MessApp	Bukalapak, Tokopedia, Bank Mandiri
4	Unsur Komunitas	Cimahi Creative Association, Komunitas IKM/UKM, Tenant Inkubasi	ASTPI, PFN, AIBI
5	Unsur Media	Media Informasi	Media elektronik lokal, Media elektronik Nasional (Media Indonesia)

Sumber : UPT Cimahi *Techno Park* dan UPT Solo *Techno Park*, 2022

Berdasarkan data kemitraan yang dimiliki UPT Cimahi *Techno Park* dan UPTD Solo *Techno Park* di atas diketahui bahwa kemitraan meliputi lima unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur pelaku bisnis, unsur komunitas dan unsur media. Jejaring lima unsur tersebut disebut dengan kolaborasi penta helix. Terdapat perbedaan pada mitra pelaku bisnis antara kedua *Techno Park* tersebut, yaitu bahwa UPT Cimahi *Techno Park* memperkuat jejaring dengan pelaku bisnis industri animasi yang merupakan tenant unggulan hasil binaan UPT Cimahi *Techno Park*, misalnya KAABA, AYENA Studio, Sekolah.id dan Lebak Hosting. Sementara itu, UPTD Solo *Techno Park* memperluas jejaring dengan perusahaan berskala lebih besar seperti Garena, GOTO, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Bank Mandiri. Kedua pendekatan tersebut merupakan contoh yang baik dalam mengembangkan jejaring dengan mitra pelaku bisnis. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, misalnya dengan munculnya *Shopee Solo Creative* dan *Innovation Hub*, dapat mengakomodasi dan memfasilitasi pelaku bisnis IKM/UKM di Kota Surakarta dengan pasar yang lebih luas. Contoh lainnya yaitu kerja sama dengan Garena yang merupakan

perusahaan pengembang *game*, dapat memfasilitasi masyarakat yang memiliki minat pada *e-sport*. Hal tersebut menambah variasi layanan yang diberikan dan menambah jangkauan layanan kepada masyarakat.

Desain Kelembagaan.

Kolaborasi penta helix dalam pengelolaan layanan technopark di Cimahi *Techno Park* dipayungi oleh Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 530 / kep-615-Disdagkoperin / 2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros (PIB). Di dalamnya disebutkan bahwa Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros mempunyai tugas melaksanakan konsultasi pengembangan bisnis berbasis teknologi, pendampingan pengembangan bisnis berbasis teknologi dan fasilitasi akses sumber daya produktif antara lain permodalan, inkubasi, akselerator, pemasaran, penerapan teknologi, manajemen dan informasi. Pelayanan technopark dikelola oleh Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaku bisnis, akademisi dan komunitas yang sumber pendanaannya berasal dari APBD. Unsur kolaborasi dalam Tim Pengelola PIB ini masih sangat kurang, karena pihak pelaku bisnis, akademisi dan komunitas diposisikan sebagai pendamping, yang artinya tidak berkontribusi dalam penyambitan keputusan dalam pengelolaan technopark. Oleh karena itu, dapat dikatakan Tim Pengelola PIB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan layanan – layanan yang dilaksanakan terpisah oleh masing – masing pemangku kepentingan.

Sementara itu, pengelolaan layanan technopark di Solo Technopark dipayungi oleh Keputusan Wali Kota Surakarta No. 900/65/1/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo *Techno Park* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. UPTD *Solo Techno Park* berstatus BLUD penuh dan sifat bisnisnya adalah sosial ekonomi serta lebih

menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pusat rujukan layanan teknologi. Pengelolaan UPTD *Solo Techno Park* sudah dilaksanakan secara kolaboratif dan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurmandi, Khozin, dan Salahudin (2018:64) bahwa “Kualitas pelayanan publik yang diberikan sangat tergantung pada bentuk organisasi yang melayaninya”. Pengelola yang kolaboratif ditunjukkan dengan Direksi yang dipimpin oleh unsur profesional yang diseleksi dengan proses seleksi terbuka. Selain itu, pola pengelolaan keuangan dengan bentuk badan layanan umum membuat pengelolaan keuangan menjadi fleksibel dengan tidak membebani APBD dan subsidi akan dilakukan dengan terbatas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperbandingkan bahwa Cimahi *Techno Park* dan *Solo Techno Park* memiliki perbedaan pada aspek tata kelola. *Solo Techno Park* yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, serta memiliki tarif untuk setiap layanan yang diberikan. Sementara itu, Cimahi *Techno Park* belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Dapat diketahui bahwa pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan layanan pada unit pelaksana teknis *Techno Park*. Layanan pada unit pelaksana teknis *Techno Park* terdiri atas pelayanan teknis, pelayanan pengembangan teknologi, pelayanan inkubasi bisnis dan pelayanan umum. Layanan tersebut yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan utama dari badan layanan umum dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan dari badan layanan umum akan dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan. Forum yang dibentuk dalam kolaborasi dikemas secara formal

melalui dokumen perjanjian kerja sama. Dalam pengembangan pelayanan pada *Techno Park* seperti pelayanan pelatihan, memerlukan kerja sama dengan pelaku bisnis sektor industri. Sebab, industri memiliki teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan dan menjadi tempat untuk penyaluran tenaga kerja terlatih. Peran komunitas juga menjadi dibutuhkan sebagai pendorong bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Sumber daya manusia yang ada pada komunitas menjadi asset investasi untuk dapat dibina dan disiapkan menjadi tenaga kerja terlatih.

Bentuk aturan pelaksanaan yang jelas dalam kolaborasi terlihat pada arah pengembangan organisasi. Pengembangan unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum sudah terdokumentasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam dokumen RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 - 2025, namun demikian hal tersebut tidak serupa dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang belum mendokumentasikan rencana pengembangan Unit Pelaksana Teknis Cimahi *Techno Park* menjadi BLUD tersebut. Hal tersebut membuat perbandingan Unit Pelaksana Teknis Cimahi *Techno Park* kepada Unit Pelaksana Teknis Solo *Techno Park* dalam potensi pengembangan menjadi wajar dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi pengembangan potensi menjadi badan layanan umum bertolak dari kolaborasi pentahelix.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa Kota Cimahi dan Kota Surakarta memiliki kekhasan dibandingkan *Techno Park* lainnya di Indonesia, yaitu fokus tema pengembangan *technopark* pada industri kreatif sektor telematika dan *technopreneurship*. Namun demikian, terdapat perbedaan dari aspek pola pengelolaan keuangan yaitu Cimahi *Techno Park* mengadopsi pola pengelolaan keuangan dengan mekanisme unit pelaksana teknis dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Cimahi. Sementara Solo *Techno Park* mengadopsi pola pengelolaan

keuangan dengan mekanisme badan layanan umum di bawah naungan BAPPEDA Kota Surakarta.

Kepemimpinan Fasilitatif.

Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam menggali nilai-nilai kemanfaatan bersama untuk dapat mencapai komitmen para aktor dalam proses kolaboratif, sehingga komitmen dapat diperkuat dengan memperjelas nilai keuntungan. Fungsi dari pemerintah adalah sebagai katalis dalam menghimpun sumber daya masyarakat di dalam satu institusi, menyediakan sumber daya, dukungan, dan penguatan institusi masyarakat (Purnomo et al., 2018 : 12). UPTD Solo *Techno Park* memiliki dominasi dalam pelaksanaan kolaborasi. Begitu juga dengan UPT Cimahi *Techno Park*. Dominasi pemerintah daerah dalam mendukung dari aspek regulasi dan penyediaan fasilitas serta dalam kasus ini secara khusus pada Solo *Techno Park* terdapat peran kepala daerah yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berkolaborasi di UPT Solo *Techno Park*. UPT Cimahi *Techno Park* juga memiliki dominasi pemerintah daerah dalam bentuk yang berbeda, yaitu keaktifan pemerintah daerah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini dengan BRIN, Kemenperin dan Kemenparekraf. Keberadaan komunitas kreatif di UPT Cimahi *Techno Park* sebagai sumber daya manusia yang berpotensi mendukung keberlanjutan kolaborasi. Selain itu, Kota Cimahi memiliki beberapa sekolah menengah kejuruan dengan fokus penjurusan pada bidang informasi dan teknologi, komputer jaringan dan animasi yang mendukung keberlanjutan industri kreatif.

Proses kolaboratif .

Keberhasilan kolaborasi melekat pada siklus kolaborasi yang berputar mulai dari komunikasi, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman sampai kepada hasil yang ingin dicapai Ansell dan

Gash (2007: 548). Siklus itu terus berputar dan berulang selama proses kolaborasi berlangsung. Dialog tatap muka menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi, bagi para aktor yang mengedepankan dialog dan negosiasi. Proses dialog tatap muka dilaksanakan oleh Cimahi *Techno Park* yang dikemas dalam dalam kegiatan forum Perangkat Daerah. Salah satunya, UPT Cimahi *Techno Park* bersama dengan Komunitas Tepi Garis melaksanakan Cimahi Digital Creative Bootcamp yang diikuti peserta Pra Inkubasi Cimahi *Techno Park* 2021. Kegiatan ini didukung oleh Bank BJB, Intel dan juga Pemerintah Kota Cimahi. Kegiatan ini juga dihadiri stakeholder terkait untuk keberlanjutan dari program pra inkubasi yang saat ini bermetamorfosa menjadi Makerspace Digital Kreatif Cimahi *Techno Park*.

Sementara itu, UPTD Solo *Techno Park* melakukan hal yang sama dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Petrotekno dalam kolaborasi pengembangan pelatihan di Solo *Techno Park* sebagai salah satu UPT dari Pemerintahan Kota Surakarta. Dalam proses membangun kepercayaan dari dialog tatap muka dihasilkan output berupa dokumen pernyataan komitmen atau pernyataan kerja sama. Seperti yang terjadi pada Cimahi Technopark yang memiliki jaringan kerja sama yang luas, misalnya dengan penandatanganan *Letter Of Intent* antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Negara Bagian Sarawak. Hal yang serupa terjadi pada UPTD Solo *Techno Park* yang menandatangani MoU kerjasama antara Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Petrotekno, Bank Mandiri, dan Bukalapak. Kepercayaan mitra kolaborasi dapat terbentuk dengan melihat potensi infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh UPTD *Techno Park*. Solo Technopark memiliki luas area 8 hektar dengan fasilitas dalam kondisi siap dari sisi infrastruktur. Hal tersebut menjadi potensial untuk

membangun kapasitas nasional sebagai pusat pelatihan dan pengembangan bisnis lokal. Potensi yang sama dimiliki juga oleh UPT Cimahi *Techno Park* yang berada di kawasan Pusat Inovasi Baros. UPT Cimahi *Techno Park* mengelola Gedung Cimahi *Techno Park* dan Gedung Baros *Information Technology Creative* (BITC). Cimahi *Techno Park* memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, *angel capital*, *seed capital*, & *venture capital*. *Stakeholder* di Cimahi *Techno Park* adalah pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media atau yang disebut dengan konsep kolaborasi penta helix yang saling bekerja sama untuk mengintegrasikan penggunaan dan pemanfaatan *Techno Park*.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa komitmen dalam proses kolaborasi dapat terjaga untuk jangka waktu menengah. Kolaborasi UPTD Solo *Techno Park* dengan perusahaan GoTo dan OJK yang mendorong program Peningkatan kapasitas usaha UMKM agar bisa naik kelas, terus bertumbuh, dan mampu bersaing dengan brand global menjadi langkah baik dalam membangun komitmen antar stakeholder. Hal yang sama juga terjadi pada UPT Cimahi *Techno Park* yang melakukan kerja sama dengan para tenant *champion* binaan UPT Cimahi *Techno Park*. Contohnya dengan diproduksi kartun animasi Super Neli yang merupakan hasil kolaborasi antara UPT Cimahi *Techno Park*, UNIKOM dan Ayena Studio. Berbagai program kegiatan pengembangan industri kreatif animasi di Kota Cimahi konsisten dilaksanakan untuk menciptakan animator-animator lokal handal yang mampu bersaing di industri film animasi global. Komitmen dalam proses kolaborasi tersebut secara alamiah akan membentuk sebuah pemahaman bersama atas tujuan yang hendak dicapai.

Pemahaman bersama terbentuk dari akumulasi hasil proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan komitmen dalam proses

kolaborasi. Sebagaimana mana disampaikan oleh Islamy (2018 : 41) bahwa *collaborative governance* adalah suatu model yang menyatukan pemangku kepentingan umum, dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat bersifat konsensus. Hal itu merujuk kepada fungsi dari masing – masing pemangku kepentingan yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Pemahaman bersama terbentuk atas pelaksanaan fungsi dari masing – masing pemangku kepentingan. Misalnya UPT Cimahi *Techno Park* maupun UPTD Solo *Techno Park* yang memfasilitasi dan menginisiasi kolaborasi, memadukan fungsi dengan komunitas yang memiliki fungsi pendorong bagi sumber daya manusia. Didukung dengan ketersediaan teknologi dan anggaran yang dimiliki pelaku bisnis, sehingga dapat membantu percepatan menuju pasar.

Hasil antara pada proses kolaborasi merupakan akumulasi dari proses kolaboratif mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses dan pemahaman Bersama yang terbangun menciptakan hasil sementara. Hasil sementara tersebut dapat menunjukkan sejauh mana proses kolaborasi menunjukkan keberhasilannya. Seperti yang terjadi pada Solo *Techno Park* dengan Program Kampus UMKM Bersama sebagai wujud dukungan dalam pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan UMKM. Berdasarkan berita pada media pasardana.id, dalam mempercepat pertumbuhan UMKM pasca pandemi, diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara *end-to-end* dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi yang mencakup penguatan kualitas manajemen, kualitas produk, akses pasar dan pembiayaan, kapasitas SDM, dan adaptasi penguasaan teknologi digital. Kampus UMKM Bersama akan mengedepankan lima fokus utama dalam mempersiapkan UMKM Go Global, yaitu program edukasi yang

berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran online, sistem pembayaran dan logistik, serta penyaluran program unggulan berbasis ekspor. Lokasi pelatihan untuk kolaborasi pertama Kampus UMKM Bersama ini akan berpusat di GoTo UMKM Center, Solo Technopark. Sama seperti pola kerja sama di Solo *Techno Park*, Cimahi *Techno Park* juga menunjukkan hasil sementara proses kolaborasi yang menjanjikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kunjungan kerja Pemerintah Negara Bagian Sarawak Malaysia ke Cimahi *Techno Park* terkait meningkatkan kerjasama untuk peningkatan ekonomi lokal. Cimahi Techopark menjadi salah satu ikon ekonomi digital di Jawa Barat khususnya di Kota Cimahi yang sudah berjalan dengan baik, melalui pengembangan industri kreatifnya.

Outcome.

UPTD Solo *Techno Park* memiliki jangkauan kerja sama lebih luas dibandingkan UPT Cimahi *Techno Park*. Dapat dilihat dari mitra kerja sama yang terlibat dengan UPT Solo *Techno Park*, yang lebih variatif. Kerja sama yang dikembangkan oleh UPTD Solo *Techno Park* tidak hanya meliputi pengembangan *technopreneurship* saja, namun juga meliputi pengembangan UMKM dan pelatihan tenaga kerja. Pola kolaborasi UPTD Solo *Techno Park* dan UPT Cimahi *Techno Park* memiliki kesamaan yaitu menggunakan pola penta helix. Pada pola penta helix tersebut, aktor atau mitra yang dominan atau primer yaitu pemerintah daerah dengan fungsi sebagai fasilitator dan regulator, pelaku bisnis sebagai penguat dan komunitas sebagai pendorong. Dalam pengamatan ini, terdapat peran dariperguruan tinggi, namun tidak terlalu dominan dalam kolaborasi. Sama halnya dengan aktor media yang memiliki peran memperluas jangkauan informasi dan pasar bagi kolaborasi di *Techno Park*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kolaborasi penta helix pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi *Techno Park* dan Unit Pelaksana Teknis Solo *Techno Park* Tahun 2021 memiliki persamaan pada dimensi kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif. Pola kolaborasi yang terdapat di UPTD *Solo Techno Park* dan UPTD Cimahi *Techno Park* memiliki persamaan yaitu menerapkan pola penta helix, dengan aktor primer adalah pemerintah, komunitas dan pelaku bisnis. Sementara aktor sekunder adalah perguruan tinggi dan media, namun peran unsur media masih belum optimal. Sementara perbedaan terdapat pada dimensi desain kelembagaan, proses kolaboratif dan outcome. Kelembagaan UPTD *Solo Techo Park* berbentuk badan layanan umum yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk membangun kerja sama lebih luas, sementara UPT Cimahi *Techno Park* dengan bentuk unit pelaksana teknis tidak memiliki fleksibilitas seperti itu, serta pola BLUD dapat mendukung keleluasaan untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Dalam proses kolaboratif, perbedaan terlihat pada variasi aktor kerja sama dengan UPTD *Solo Techno Park* memiliki cakupan lebih luas. Beberapa indikasi perbedaan tersebut mengarah kepada faktor perbedaan bentuk desain kelembagaan pada UPTD *Techno Park*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Abd Rachim. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press (ed.)). Universitas Diponegoro Press.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2020). *Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020*.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- <https://play.google.com/books/reader?id=LSmJDwAAQBAJ&pg=GBS>.

PA19

- Muhammad, N. A., Muhyiddin, Faisal, A., & Anindito, I. A. (2017). Studi Pembangunan Science and Technopark (STP) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning*, 1(1), 14–31.
- Nurmandi, A., Khozin, M., & Salahudin. (2018). *Pelayanan Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press.
- Pamudji. (1994). *Perbandingan Pemerintahan* (Sudarmanto (ed.)). Bina Aksara.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Collaborative governance dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat. In *Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Issue 1).
- Septriliya, N. (2018). *Quadruple Helix Collaboration Pada Kawasan Cimahi Techno Park (CTP) Dalam Pengembangan Industri Kreatif Klaster Animasi di Kota Cimahi*. Universitas Padjadjaran.
- UPT Cimahi Techno Park. (2021). *Profil Cimahi Techno Park*. <https://www.cimahitechnopark.id/visi-dan-misi.html>.
- UPT Solo Techno Park. (2021). *UPT Solo Techno Park*. <https://solotechnopark.id/>
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.
- Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 530 / kep-615-Disdagkoperin / 2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros (PIB).

Keputusan Wali Kota Surakarta No. 900/65/1/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.